

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap Petugas Administrasi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup kedudukan Petugas Administrasi dengan tugas Tenaga Pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan mempekerjakan Tenaga Pendamping dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Berkaitan dengan itu, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum Petugas Administrasi dengan tugas sebagai Tenaga Pendamping dengan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukumnya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan metode pendekatan masalah menggunakan perundang-undangan (*statue approach*), serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Petugas Administrasi dengan tugas Tenaga Pendamping menurut ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa petugas Administrasi tersebut adalah tenaga kerja waktu tertentu. Namun, dilihat dari jenis pekerjaannya hal ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seharusnya dalam perjanjian kerjanya Petugas Administrasi dengan tugas tenaga kerja pendamping lebih diperjelas atau disebutkan sebagai tenaga kerja waktu tertentu (PKWT). Dan Perlindungan Hukumnya Petugas Administrasi dengan tugas tenaga pendamping di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seyogyanya tenaga pendamping mendapatkan perlindungan pengupahan serta kesejahteraan yang layak seperti perlindungan jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Kata Kunci : Kedudukan, Perlindungan Hukum, Tenaga Administrasi

ABSTRACT

Legal protection of administrative officer according to law Number 13 of 2003 concerning manpower includes the position of administrative officer with the task of assisting personel in the Community and Village Empowerment Office of the Pamekasan Regency. To employ assistant in a manner that is not in accordance with applicable regulations. In Article 59 of Law Number 13 of 2003 related to that, the problem examined in this thesis is how the legal position of the administrative officer with the task as a companion is based on the labor law and how the legal protection of the law.

The method in this research is empirical juridical law research method, using statue apporoach method, and analysis of legal meterial used is descriptive analysis technique.

The results of this study indicate that position of administrative officer with the task of accompanying personnel according to the provisions of article 56 paragraph 2 of Act Number 13 of 2003 concerning manpower that the administrative officer is a certain time labor. However, judging from the type of work it is contrary to article 59 paragraph 1 of the labor law. In the agreement, the administrative officer with the task of the accompanying workforce is more clearly or mentioned as a certain time workforce. And the legal protection of administrative officer with the duties of assistants in the Community and Village empowerment officer of Pamekasan Regency is not in accordance with what has been determined by the labor law. Workers should get proper wage and welfare protection such as social security protection, health and safety protection.

Keyword : Position, Legal Protection, Administration Staff

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Keaslian Penulisan	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	8
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	9
1.6.4 Jenis Data	9
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.6.6 Teknik Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI

2.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	13
A. Pengertian Pekerja	14
B. Pengertian Tenaga Kerja.....	16
C. Pengertian Hubungan Kerja.....	17
D. Pengertian Perjanjian Kerja.....	19
E. Macam-Macam Perjanjian Kerja	21
2.2 Pengertian Perlindungan Hukum	22
a. Sarana Perlindungan Hukum	27
b. Objek Perlindungan Tenaga Kerja	29
c. Jenis Perlindungan Tenaga Kerja	29

**BAB III Hak-Hak dan Perlindungan Petugas Administrasi di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan**

3.1 Gambaran Tempat Penelitian.....	30
3.1.1 Dinas Pemberdayaan dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan	30
3.2 Keadaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pamekasan	33
3.3 Kedudukan Petugas Administrasi yang Bertugas Sebagai Tenaga Pendamping di Dinas PMD Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	37
3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pamekasan Berdasarkan Undang- Undang Ketenagakerjaan	43

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Penduduk Kabupaten Pamekasan 2016 berdasarkan wilayah kecamatan	35
3.2 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2011-2015	36
3.3 Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan	37

DAFTAR BAGAN

3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Kabupaten Pamekasan	33
---------------------------	----